



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI SANTOSA ASRORI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **84229**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m²/150 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m²/200 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 149 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m²/90 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 406.550.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.800.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.750.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.394.925.994

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----



Sub Total	Rp.	3.281.475.994
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.281.475.994

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.